

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press, 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Hadjon, Philipus M., et.al. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- HS, Tomo. *Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*. Jakarta: Indocamp, 2019.
- Indrajit, Richardus Eko dkk. *E-Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Lukman, Marcus. Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran, 1996.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Moenek, Reydonnyzar dan Dadang Suwanda. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nasima, Imam. *Judicial Sector Support Program-Penjelasan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Center for International Legal Cooperation (CILC) dan Lembaga Kajian Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019.

Sedarmayanti. *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: PT Mandar Maju, 2003.

Sedarmayanti. *Membangun Sistem Manajemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT Mandar Maju, 2004.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Raja Grafindo, 1995.

Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Spelt, N.M. dan J.B.J. Ten Berge. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Yuridika Pratama, 1992.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sumardjono, Maria Sri Wulani. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2001.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003.

Wasistono, Sadu. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokusmedia, 2003.

Zamzam, Fakhry. *Good Governance Sekretariat DPRD*. Sleman: Deepublish, 2015.

B. Artikel Jurnal

Pietersz, Jemmy Jefry. "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang" *SASI* Volume 23 Nomor 2 (2017): 167-188.

Soejatmo, "Pengawasan Melekat," *Jurnal Administrasi Publik*, 1986.

Wairocana, I Gusti Ngurah. "Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah", *Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan di Kabupaten Magelang.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

D. Internet

Sistem Pendaftaran dan Tracking Perizinan Kabupaten Magelang,

<https://sidering.magelangkab.go.id/>, (diakses pada April, 2024).